

PEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN LAHAN PERTANIAN DI PEDESAAN INDONESIA

Studi Kasus:

Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan

Oleh:

Yusmichad Yusdja

Catatan Redaksi:

Tulisan ini merupakan risalah umum dari hasil penelitian pengusahaan lahan pertanian pada Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan tulisan lengkapnya dapat dibaca pada artikel bersangkutan dalam edisi Forum Agro Ekonomi ini.

PENDAHULUAN

Sekitar 70% rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Mereka bekerja dan memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut. Karena itu tanah merupakan asset yang sangat penting bagi rakyat pedesaan. Dalam hal ini kasus pemilikan, pengusahaan tanah dan status penggarap merupakan komponen yang dapat menjelaskan kondisi asset tanah ini di pedesaan dalam kaitan sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan kondisi pemilikan dan penggarapan tanah pertanian di pedesaan Indonesia dengan mengambil studi kasus 22 desa Jawa Timur, 15 desa Jawa Barat, 12 desa Sumatera Barat dan 11 desa di Sulawesi Selatan. Dalam tulisan ini akan diungkapkan mengenai kondisi pemilikan dan pengusahaan tanah dilihat secara agregat.

DISTRIBUSI PEMILIKAN TANAH PERTANIAN

Dataran Rendah

Pada umumnya sepertiga dari jumlah RT (Rumah Tangga) dari empat propinsi daerah DR (Dataran Rendah) tidak atau mempunyai tanah pertanian yang sempit, antara 0 sampai 0,25 ha (Tabel 1). Golongan petani ini, jika tak ada

kesempatan kerja di luar pertanian, akan melakukan kegiatan berburuh atau menggarap tanah orang lain. Terutama untuk propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan dimana sebaran luas lahan pertanian bagi mereka sangat kecil (masing-masing 3.0, 4.3 dan 2.9%), dengan kata lain sebagian besar petani pada kelompok ini mempunyai tanah pertanian yang sangat sempit, dan karena itu adalah sulit bagi mereka menggan-

Tabel 1. Persentase Distribusi Pemilikan Lahan Pertanian Pada Dataran Rendah.

	Kelas Pemilikan			
	I	II	III	IV
Pemilihan (%)				
— Jawa Timur	37.8 (3.0)	13.2 (11.7)	21.4 (16.3)	27.6 (68.5)
— Jawa Barat	29.0 (4.3)	25.8 (16.7)	26.7 (31.5)	18.5 (48.4)
— Sumatera Barat	37.0 (14.0)	27.0 (20.0)	24.0 (25.0)	12.0 (41.0)
— Sulawesi Selatan	26.3 (2.9)	12.3 (4.3)	16.3 (12.5)	45.1 (70.3)

Keterangan: 1) Kelas I = < 0.250 ha
II = 0.250 - < 0.50 ha
III = 0.50 - 1.0 ha
IV = > 1.0 ha

2) Angka dalam kurung adalah persentase sebaran luas lahan.

tungkan diri pada tanah miliknya.

Jika diakumulasikan semua RT pada kelas pemilikan III dan IV ternyata 84.8% tanah pertanian DR dikuasai oleh hampir setengah dari jumlah RT (49.0%), dengan luas pemilikan lebih 0.5 ha per RT. Jika dilihat bahwa umumnya tanah di DR merupakan daerah subur, maka tanah merupakan asset yang bernilai tinggi, sehingga timbul kecenderungan sebagian masyarakat untuk menguasai asset ini. Konsekuensi yang timbul adalah ketergantungan lapangan kerja pada sektor pertanian menurun. Hal ini akan jelas terlihat pada distribusi garapan terutama untuk lahan sawah.

Demikian juga jika di akumulasikan semua RT yang tidak bertanah dan yang memiliki kurang dari 0.5 ha, ternyata di Jawa Barat terdapat 54.8% RT berada pada kelompok ini (kelas I dan II) dengan menguasai 21% tanah pertanian pada daerah dataran rendah. Dengan kata lain lebih dari setengah RT di pedesaan Jawa Barat hanya menguasai seperlima dari luas lahan pertanian yang ada. Sedangkan yang memiliki lahan pertanian antara 0.5 - 1 ha, sekitar seperempat dari jumlah petani, dengan menguasai sepertiga lahan pertanian (31.5%). Keadaan ini semakin timpang, jika dilihat lebih jauh bahwa setengah dari luas lahan pertanian (48.4%) hanya dikuasai oleh sebagian kecil petani (18.5%).

Kondisi yang hampir sama juga berlaku di Sumatera Barat. Secara akumulasi (kelas I dan II), ternyata lebih dari setengah RT (64%) Sumatera Barat hanya menguasai sepertiga lahan pertanian di dataran rendah (34%) dengan luas pemilikan yang sempit antara 0 - 0.5 ha. Hanya sekitar sepersepuluh petani (12%) yang menguasai hampir setengah lahan pertanian yang ada (41%) dengan luas pemilikan > 1 ha. Petani Sulawesi Selatan, kondisinya lebih baik, dimana hampir setengah petani (45.1%) menguasai hampir 3/4 lahan pertanian yang ada dengan luas pemilikan > 1 ha. Hanya sepertiga petani (28.6%) yang menguasai tanah pertanian DR dengan luas pemilikan yang sempit (7.2%).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemilikan tanah di dataran rendah Jawa Barat dan Sumatera Barat sebagai asset penting lebih banyak dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat. Ini memberi petunjuk awal, terjadinya peningkatan kegiatan berburuh, pengangguran, menggarap tanah orang lain, mobilitas tenaga kerja terutama jika lapangan kerja sektor non pertanian tidak cukup

tersedia di desa. Gejala ini nampaknya belum begitu masalah bagi daerah dataran rendah Sulawesi Selatan.

Dataran Tinggi

Pemilikan lahan pertanian DT Jawa Timur hampir seluruhnya (90%) dikuasai oleh setengah (54%) RT pedesaan. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa pertanian bukanlah lapangan pekerjaan yang menarik bagi sebagian besar masyarakat desa DT. Kondisi ini akan lebih jelas terlihat pada saat perubahan luas garapan sawah dan lahan kering DT.

Ketimpangan pemilikan tanah pertanian di Propinsi Jawa Barat masih terlihat pada daerah DT. Lebih dari setengah RT dataran tinggi (59.2%) hanya menguasai 7.6% lahan pertanian. Sebagian besar lahan pertanian tersebut (66.1%) hanya dikuasai oleh 14.3% petani dataran tinggi dengan luas pemilikan lebih 1 ha. Secara akumulasi (kelas I dan II) persentase RT yang mempunyai pemilikan tanah antara 0 - < 0.5 ha adalah sebesar 72.5% dan dengan luas lahan pertanian yang dikuasai hanya 16.7% (Tabel 2). Jika digabungkan pemilikan lahan pertanian kelas III dan IV, ternyata 83.2% lahan pertanian dikuasai oleh 27.4% RT di DT dengan luas pemilikan > 0.5 ha.

Tabel 2. Persentase Distribusi Pemilikan Lahan Pertanian Pada Dataran Tinggi.

	Kelas Pemilikan			
	I	II	III	IV
Pemilikan (%)				
— Jawa Timur	19.1 (1.0)	10.6 (2.4)	15.8 (6.3)	54.3 (90.2)
— Jawa Barat	59.2 (7.6)	13.3 (9.1)	13.1 (17.1)	14.3 (66.1)
— Sumatera Barat	37.0 (8.0)	19.0 (18.0)	20.0 (26.0)	24.0 (52.0)
— Sulawesi Selatan	22.1 (1.3)	10.1 (3.2)	26.9 (16.9)	40.9 (78.3)

Keterangan: Lihat catatan kaki Tabel 1.

Pemilikan lahan pertanian pada DT Sumatera Barat lebih menyebar secara baik dalam tiap kelas pemilikan. Secara akumulasi (kelas I dan II), RT yang memiliki lahan pertanian < 0.5 ha ternyata lebih dari setengah jumlah RT (56%)

dengan penguasaan lahan pertanian sebesar 26%. Namun lebih tiga perempat lahan pertanian (78%) dalam kelas pemilikan III dan IV ternyata dikuasai oleh hampir setengah RT di DT (44%). Kondisi ini cukup berimbang, dibandingkan dengan kondisi pemilikan lahan pertanian pada DR Sumatera Barat.

Penguasaan lahan pertanian pada DT Sulawesi Selatan masih baik, dimana dalam kelas pemilikan III dan IV, terdapat hampir tiga perempat RT (67.8%) menguasai sebagian besar lahan pertanian (95.2%) dengan luas pemilikan > 0.5 ha. Hanya sekitar sepertiga RT di DT Sulawesi Selatan yang menguasai 4.8% lahan pertanian dengan pemilikan kurang dari 0.5 ha.

Jika dilihat dari segi kepadatan penduduk dan hasil pertanian, maka Jawa Barat adalah daerah terpadat dan merupakan sentral produksi beras, menyusul Sumatera Barat dan akhirnya Sulawesi Selatan. Maka jelas terlihat bahwa ada kecenderungan semakin padat penduduk, semakin sedikit petani yang menguasai lahan pertanian, tetapi dengan penguasaan areal yang semakin luas. Dilain pihak, semakin padat penduduk, semakin banyak petani memiliki lahan sempit. Ini berarti, penambahan penduduk tidak diimbangi oleh sebaran penguasaan lahan yang seimbang. Jika dilihat dari kelas pemilikan, terdapat kecenderungan, pada daerah yang semakin padat penduduk, maka sebaran pemilikan semakin miring kearah pemilikan sempit.

PEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN LAHAN PERSAWAHAN

Lahan sawah adalah bagian utama dari lahan pertanian, dan merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja penting bagi masyarakat pedesaan. Atas dasar itu, penting sekali diamati bagaimana keadaan pemilikan dan pengusahaan lahan sawah ini baik sebagai faktor produksi atau sebagai asset.

Dataran Rendah

Sebagaimana terlihat pada distribusi pemilikan tanah pertanian DR di Jawa Timur, maka kondisi yang sama juga terjadi pada pemilikan lahan sawah DR. Sekitar 80.7% lahan sawah DR Jawa Timur dikuasai oleh 36.1% RT pedesaan, pada kelas III dan IV (Tabel 3). Dengan demikian, pemilikan lahan sawah DR di Jawa Timur, dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat desa.

Tabel 3. Persentase Sebaran Pemilikan dan Pengusahaan Lahan Sawah Daerah Dataran Rendah.

	Kelas Luas Lahan			
	I	II	III	IV
Jawa Timur				
Pemilikan	45.3 (5.3)	18.6 (12.0)	19.7 (25.1)	15.4 (55.6)
Pengusahaan	76.5 (10.6)	10.9 (19.8)	7.9 (29.4)	5.3 (40.0)
Jawa Barat				
Pemilikan	37.1 (3.8)	21.0 (10.9)	18.7 (17.1)	22.2 (68.1)
Pengusahaan	33.2 (6.0)	28.2 (19.2)	21.5 (27.3)	17.1 (47.2)
Sumatera Barat				
Pemilikan	55.0 (5.0)	25.0 (28.0)	15.0 (38.0)	5.0 (29.0)
Pengusahaan	65.0 (6.0)	21.0 (37.0)	12.0 (43.0)	2.0 (14.0)
Sulawesi Selatan				
Pemilikan	45.4 (2.0)	13.1 (8.0)	18.5 (37.0)	23.0 (53.0)
Pengusahaan	35.1 (2.0)	14.2 (7.3)	25.3 (25.6)	25.4 (65.1)

Keterangan: Lihat catatan kaki Tabel 1.

Konsekuensi dari kondisi di atas cenderung menimbulkan semakin menurunnya ketergantungan RT pada lapangan kerja pertanian. Hal ini jelas terlihat pada distribusi penggarapan lahan sawah (Tabel 3). Sekitar tiga perempat (76%) pedesaan daerah DR ternyata tidak menggarap atau menggarap lahan sawah dengan luas yang sempit antara 0 - <0.25 ha.

Pemilikan lahan sawah DR Jawa Barat, terlihat menyebar merata pada setiap kelas pemilikan (Tabel 3). Tetapi terdapat ketimpangan dalam hal sebaran luas pemilikan lahan sawah. Sebagian besar lahan sawah (85.2%) di kuasai oleh kurang dari setengah RT (40.9%) dengan kelas pemilikan I dan II. Dengan demikian lebih dari setengah petani Jawa Barat (58.1%) di DR hanya menguasai 14.8% lahan sawah dengan pemilikan kurang dari 0.5 ha.

Dilihat dari segi pengusahaan atau penggarapan sawah dataran rendah Jawa Barat terjadi pergeseran yang rendah dari kondisi pemilikan lahan. Sepertiga dari RT Jawa Barat (33.2%) mengusahakan hanya 6% dari lahan sawah dataran rendah. Untuk penggarapan kelas II, dan III, terjadi kenaikan jumlah petani yang mengga-

rap dibandingkan pemilikan dengan perubahan masing-masing 7 dan 3%, tetapi jumlah lahan yang digarap lebih luas dibandingkan pemilikan, masing-masing 9 dan 10% lebih tinggi. Sedangkan pada penggarapan kelas IV, jumlah petani penggarap menjadi lebih kecil 5% dibandingkan pemilikan, sedangkan luas garapan turun 21%. Sedangkan luas rata-rata garapan di DR Jawa Barat adalah 0.52 ha.

Keadaan ini cukup memperlihatkan adanya penyebaran lahan pemilikan lebih 1 ha kepada RT berlahan yang lebih sempit yang cukup berarti. Namun RT penggarap berlahan sempit < 0.25 ha hanya sedikit menarik pendistribusian tersebut. Pendistribusian itu lebih banyak dimiliki oleh kelompok kelas II dan III. Secara keseluruhan, distribusi penggarapan lahan sawah dataran rendah lebih menjurus pada penggarapan kelas III dan IV, dimana hampir tigaperempat sawah (74.6%) diusahakan oleh 39.6% RT.

Sumatera Barat memperlihatkan keadaan yang lebih buruk, lebih setengah (55%) RT pedesaan tidak atau memiliki sawah DR yang sempit yakni kurang < 0.250 ha dan hanya menguasai 5% dari luas sawah DR. Secara akumulasi pemilikan antara 0 - 0.5 ha dikuasai oleh sebagian besar petani yakni 80%, tetapi hanya menguasai sepertiga lahan sawah dataran rendah (33%). Penguasaan terluas (62.0%) yakni pemilik lebih 0.5 ha, berada pada seperlima RT pedesaan (20%).

Dilihat dari segi pengusahaan, Sumatera Barat mempunyai perbedaan dengan Jawa Barat. Persentase yang menggarap lahan sawah < 0.25 ha meningkat 10% dibandingkan pemilikan, sedangkan luas lahan yang diusahakan hanya bertambah 1%. Dengan demikian lahan yang digarap oleh sebagian besar RT di DR sangat sempit. Jumlah penggarap pada kelas lahan II dan III turun masing-masing 4 dan 3%, namun luas lahan yang digarap naik 9 dan 5% dibandingkan pemilikan. Berarti ada kecenderungan RT pedesaan DR Sumatera Barat, untuk tidak jadi petani. Keadaan ini lebih terlihat pada penggarapan lahan IV, jumlah RT turun 3%, tetapi luas lahan turun lebih besar yakni 15% dibandingkan pemilikan. Di Jawa Barat kecenderungan itu justru sebaliknya, terutama pada penggarapan kelas II dan III.

Kondisi pemilikan dan pengusahaan lahan sawah DR Sulawesi Selatan cenderung sama dengan Jawa Barat. Hampir setengah dari RT pedesaan Sulawesi Selatan menguasai 90% lahan

sawah DR dengan pemilikan 70.5 ha, sisanya 10% dikuasai oleh lebih setengah RT pedesaan (58.5%). Sedangkan jumlah RT yang menggarap lebih dari setengah RT pedesaan (50.7%) pada kelas III dan IV dengan luas lahan 91.7%. Kondisi ini memperlihatkan sebagian besar RT pedesaan masih kurang dalam alam pertanian dengan mengusahakan sawah lebih dari 0.5 ha. Kenyataan ini didukung pula kegiatan lahan distribusi petani penggarap ternyata cenderung lebih besar pada skala II, III dan IV dan penggarapan itu bergerak kepengusahaan yang lebih luas.

Dataran Tinggi

Sebagian besar RT pedesaan Jawa Barat di DT ternyata tidak mempunyai atau mempunyai sawah yang < 0.25 ha (81.8%). Kelompok terbesar ini hanya menguasai seperlima luas sawah yang ada di DT. Sedangkan yang mempunyai lahan sawah terbesar hanyalah sekelompok RT yakni 8.9% (kelas III dan IV) dengan menguasai lebih setengah luas sawah yang ada (61.7%). Dibandingkan dengan penguasaan lahan sawah DR maka kecenderungan lahan sawah dikuasai sebagian kecil masyarakat ternyata lebih kuat pada daerah DT, sebagaimana terlihat pada Tabel 4, persentase RT yang menguasai lahan sawah kurang 0.5 ha sebesar 95.1%, dengan luas lahan 38.3% dari luas lahan yang ada di DT.

Dari segi pengusahaan sawah ternyata polanya hampir sama dengan pemilikan. Sebagian besar RT pedesaan DT Jawa Barat (80.6%) mengusahakan seperlima dari luas sawah (20.7%). Sedangkan lebih dari setengah sawah yang ada diusahakan oleh 8.9% RT (kelas III dan IV) dengan persentase luas lahan yang diusahakan lebih dari setengah luas sawah (58.2%). Keadaan ini cukup memberikan petunjuk adanya ketimpangan lapangan kerja dan sumber pendapatan dari sawah, yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil RT pedesaan dataran tinggi Jawa Barat (Tabel 4).

Pemilikan lahan sawah DT Jawa Timur, sebagian besar (75.6%) hanya dikuasai oleh sepertiga RT pedesaan. Sedangkan yang memiliki lahan sempit atau tidak mempunyai lahan adalah sekitar 26.5%. Tetapi jumlah ini meningkat menjadi 76.9% RT dilihat dari ketergantungan pada luas lahan garapan yang sempit atau tak ada sama sekali (Tabel 4).

Tabel 4. Persentase Sebaran Pemilikan dan Pengusahaan Lahan Sawah Daerah Dataran Tinggi.

	Kelas Lahan			
	I	II	III	IV
Jawa Barat				
Pemilikan	81.8 (20.7)	8.3 (17.6)	6.7 (27.4)	2.2 (34.3)
Pengusahaan	80.6 (20.7)	10.3 (20.8)	6.1 (23.4)	2.8 (34.8)
Jawa Timur				
Pemilikan	26.5 (2.8)	12.9 (4.8)	24.9 (18.5)	35.1 (75.6)
Pengusahaan	76.9 (16.9)	11.2 (24.6)	9.2 (36.8)	2.4 (21.4)
Sumatera Barat				
Pemilikan	59.0 (12.0)	18.0 (20.0)	15.0 (34.0)	8.0 (36.0)
Pengusahaan	45.0 (11.0)	26.0 (24.0)	21.0 (38.0)	8.0 (27.0)
Sulawesi Selatan				
Pemilikan	60.7 (0.2)	5.7 (3.5)	11.5 (12.6)	22.0 (83.0)
Pengusahaan	60.3 (0.5)	5.7 (3.6)	9.0 (10.3)	25.0 (85.6)

Keadaan pemilikan dan pengusahaan lahan sawah dataran tinggi Sumatera Barat umumnya sama dengan Jawa Barat. Lebih dari setengah RT di DT Sumatera Barat hanya menguasai sekitar seperlima luas sawah yang ada. Sebagian besar luas sawah (70.0%) di DT, ternyata dikuasai oleh sebagian kecil RT (23%) dengan luas garapan > 0.5 ha. Dari segi pengusahaan, terlihat kecenderungan RT untuk mengusahakan lahan pada kelas II dan III, yakni sekitar 47.0 RT dengan persentase luas pengusahaan 62.0% dengan luas garapan > 0.5 ha.

Berbeda dengan dua propinsi lain, pemilikan lahan sawah DT Sulawesi Selatan terluas pada kelas III dan IV (96.3%) ternyata dikuasai oleh hanya sepertiga RT pedesaan (33.6%). Sebagian besar RT (60.7%) mengusahakan tanah sawah yang sangat sempit (0.2%). Kondisi ini hampir sama dari segi pengusahaan dimana 95.9% dari luas sawah dataran tinggi ternyata diusahakan oleh 34.0% RT. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pengusahaan sawah sebagai asset maupun faktor produksi berada pada sebagian kecil masyarakat pedesaan Sulawesi Selatan.

Tabel 5. Rata-rata Luas Garapan Sawah Dataran Rendah (DR) dan Dataran Tinggi (DT).

	DR (Ha)	DT (Ha)	Total (Ha)
Jawa Timur	0.172	0.139	—
Jawa Barat	0.520	0.170	0.260
Sumatera Barat	0.160	0.350	0.260
Sulawesi Selatan	0.610	0.540	0.560

PEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN LAHAN KERING

Dataran Rendah

Lebih dari setengah RT DR Jawa Timur (69.7%) menguasai lahan kering dari 0 - < 0.25 ha. Keadaan ini memperlihatkan rendahnya ketergantungan masyarakat DT pada lahan kering. Hal ini semakin jelas pada status penggarapan yang ternyata 76.9% RT menyatakan tidak menggarap atau menggarap lahan kering dengan luas yang sempit. Hampir setengah luas lahan kering DR Jawa Timur (42.5%) hanya diusahakan oleh 5.0% RT dengan luas garapan lebih 1.0 ha.

Berbeda dengan pemilikan lahan sawah maka sebagian besar pemilikan lahan kering DR Jawa Barat (96.8%) ternyata dikuasai oleh hampir tiga perempat RT pedesaan (73.7%) dengan luas penguasaan antara 0 - < 0.5 ha. Dilihat dari segi pengusahaan, angka persentase ini bergeser yakni 98.1 RT pedesaan mengusahakan lahan kering DR sebesar 77.9% dari total luas lahan kering dengan luas garapan antara 0 - < 0.5 ha dan rata-rata luas garapan 0.058 ha. Berdasarkan pergeseran angka persentase antara pemilikan dan pengusahaan, terlihat ada kecenderungan bahwa lahan kering DR Jawa Barat bukanlah asset yang menarik bagi lapangan kerja dan sumber pendapatan.

Demikian juga dengan pemilikan lahan kering DR di Sumatera Barat, dikuasai oleh 87.0% RT pedesaan, dengan menguasai 79.0% luas lahan kering. Namun hanya sekitar setengah dari luas lahan kering DR (45.0%) yang diusahakan oleh sebagian besar RT pedesaan (96.0%), dengan rata-rata garapan 0.056 ha. Sedangkan 58.0% luas lahan kering hanya diusahakan oleh hanya 4.0% RT. Berdasarkan pergeseran angka persentase antara pemilikan dan pengusahaan, terlihat kecenderungan bahwa lahan kering DR bukanlah asset yang menarik bagi sebagian besar

masyarakat pedesaan Sumatera Barat di DR (Tabel 6).

Distribusi pemilikan lahan kering di DR Sulawesi Selatan mempunyai pola yang berbeda dengan dua propinsi terdahulu. Di daerah ini sebagian besar lahan kering (89.1%) justru dikuasai oleh sebagian kecil RT pedesaan (33.2%) dengan luas pemilikan antara 0.5 - > 1.0 ha. Dilihat dari segi penguasaan, sekitar 68.1% luas lahan kering DR ini diusahakan oleh 28.6% RT pedesaan. Sementara sebagian besar RT pedesaan DR (71.4%) hanya mengusahakan 31.9% dari luas lahan kering. Luas garapan rata-rata cukup berarti yakni 0.380 ha. Dilihat dari pergeseran angka persentase antara pemilikan dan pengusahaan, maka lahan kering DR di Sulawesi Selatan masih merupakan lapangan kerja dan sumber pendapatan yang menarik bagi RT pedesaan. Masalahnya terletak pada pendistribusian pemilikan sangat timpang.

Tabel 6. Persentase Distribusi Pengusahaan Lahan Kering Pada Dataran Rendah.

	Kelas Pengusahaan			
	I	II	III	IV
Jawa Timur				
Pemilikan	69.7 (15.9)	13.0 (16.8)	11.5 (29.7)	8.9 (13.2)
Pengusahaan	76.9 (10.0)	8.8 (15.8)	9.0 (25.1)	5.0 (42.5)
Jawa Barat				
Pemilikan	88.1 (41.7)	8.7 (32.0)	2.7 (19.8)	0.5 (6.4)
Pengusahaan	92.8 (48.2)	5.3 (29.5)	1.7 (19.1)	0.2 (3.1)
Sumatera Barat				
Pemilikan	65.0 (68.0)	21.0 (11.0)	10.0 (12.0)	4.0 (4.0)
Pengusahaan	91.0 (19.0)	5.0 (26.0)	2.0 (14.0)	2.0 (42.0)
Sulawesi Selatan				
Pemilikan	58.4 (5.2)	8.4 (5.9)	10.1 (14.9)	23.1 (74.2)
Pengusahaan	61.0 (7.0)	10.4 (24.9)	15.1 (38.9)	13.5 (29.2)

Tabel 7. Rata-rata Luas Garapan Lahan Kering Dataran Rendah (DR) dan Dataran Tinggi (DT).

	DR (Ha)	DT (Ha)	Total (Ha)
Jawa Timur	0.190	0.562	—
Jawa Barat	0.058	0.490	0.370
Sumatera Barat	0.056	0.270	0.200
Sulawesi Selatan	0.380	0.480	0.410

Dataran Tinggi

Pemilikan lahan kering DT di Jawa Timur ternyata sebagian besar (76.6%) dikuasai oleh 29.3% RT. Ketimpangan ini memperlihatkan lebih sepertiga RT DT ini tidak atau memiliki lahan kering yang sempit. Dilihat dari pergeseran angka pemilikan dan pengusahaan ternyata lahan kering tidak menarik bagi lapangan kerja umumnya masyarakat desa DT (45.1%). Lahan kering DT Jawa Timur ini umumnya (69.4%) hanya diusahakan oleh sebagian kecil masyarakat desa (28.4%).

Berbeda dengan pemilikan lahan kering DR Jawa Barat yang lebih dikuasai oleh sebagian besar RT, maka pada DT terjadi yang sebaliknya.

Tabel 8. Persentase Distribusi Pengusahaan Lahan Kering Pada Dataran Tinggi.

	Kelas Lahan			
	I	II	III	IV
Jawa Timur				
Pemilikan	39.4 (3.1)	10.8 (3.9)	20.0 (15.9)	29.3 (76.6)
Pengusahaan	45.1 (2.7)	10.0 (5.1)	21.3 (22.4)	23.4 (69.4)
Jawa Barat				
Pemilikan	72.7 (8.7)	8.9 (8.5)	8.0 (14.2)	10.2 (68.4)
Pengusahaan	72.6 (5.8)	10.0 (7.0)	7.9 (10.2)	9.5 (76.7)
Sumatera Barat				
Pemilikan	57.0 (6.0)	15.0 (11.0)	14.0 (20.0)	14.0 (63.0)
Pengusahaan	64.0 (6.0)	13.0 (14.0)	14.0 (2.9)	9.0 (51.0)
Sulawesi Selatan				
Pemilikan	46.7 (5.7)	13.7 (9.7)	21.7 (28.9)	17.9 (55.7)
Pengusahaan	48.1 (2.9)	15.4 (10.6)	26.9 (33.3)	19.6 (53.2)

Hampir sebagian besar luas lahan kering (82.6%) pada kelas III dan IV, dikuasai oleh sebagian kecil RT pedesaan (18.2%). Dilihat dari segi pengusahaan, ternyata pada luas lahan kering yang diusahakan oleh sebagian kecil RT membengkak menjadi 86.9%. Sementara luas lahan kering yang digarap oleh sebagian RT menurun 2.9%. Kondisi ini memperlihatkan kecenderungan bahwa lahan kering DT merupakan asset yang menguntungkan, karena itu terlihat kecenderungan penguasaan oleh sebagian masyarakat pedesaan. Kenyataan ini didukung oleh luas garapan yang cukup berarti yakni 0.49 ha.

Pola kepemilikan dan pengusahaan lahan DT Sumatera Barat sama dengan Jawa Barat. Sebagian besar RT dataran tinggi (72%) hanya menguasai sebagian kecil lahan kering (17%) pola kelas I dan II. Sebanyak 83% dikuasai oleh sebagian kecil RT. Kondisi ini tidak banyak

berubah jika dilihat dari segi pengusahaan. Dimana lebih tiga perempat RT di DT hanya mengusahakan 20% lahan kering dengan luas garapan antara 0 - < 0.5 ha. Luas garapan rata-rata adalah 0.27 ha.

Pola yang sama juga terjadi dalam kepemilikan dan pengusahaan lahan kering DT Sulawesi Selatan. Sebagian besar dari luas lahan kering (84.6%) dikuasai oleh lebih sepertiga RT pedesaan (39.6%) pada kelas III dan IV. Dari segi luasan pengusahaan angka itu membengkak menjadi 88.5% tetapi diusahakan oleh sebagian kecil RT pedesaan (36.5%). Atas dasar itu, dapat disimpulkan adanya kecenderungan penguasaan dan kepemilikan lahan kering DT oleh sebagian kecil RT pedesaan. Luas garapan rata-rata juga cukup berarti yakni 0.48 ha.